



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
HASIL REVIU**

TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya berbagai kenikmatan yang luar biasa khususnya nikmat Sehat, Nikmat Iman sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tahun 2025.

Dalam rangka penyusunan dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah adalah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2025 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang

timbul saat ini, serta memuat rancangan program, kegiatan, sub kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju tahun 2026 dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Demak demi terwujudnya visi yaitu “Demak yang Bermartabat Maju dan Sejahtera”.

Demak, 7 Agustus 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak

KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	v
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
4.1. Program dan Kegiatan	60
2.6 4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi.....	82
BAB V PENUTUP	84
5.1. Catatan Penting	84
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	84
5.3. Rencana Tindak Lanjut	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	19
Tabel 2 2	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023.....	30
Tabel 2 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Demak	31
Tabel 2 4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Demak.....	40
Tabel 2 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Demak.....	50
Tabel 3 1	Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2025.....	59
Tabel 4 1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Demak.....	64
Tabel.4.2	Rumusan Rencana Program Prioritas Dan Rencana Implementasi Tahun 2025	83

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Tema pembangunan tahun 2025 disintesis dari visi RPJPD, tema RKP 2025, tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Terdapat tiga kata kunci yang tersurat maupun tersirat dalam setiap visi/tema pembangunan, yaitu : kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun arah kebijakan pembangunan yang akan ditangani, untuk tema pembangunan tahun 2025 adalah

”PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BERKALANJUTAN”,

Peningkatan kapasitas Pembangunan berkelanjutan menjadi krusial dalam era modern ini. Infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan lingkungan. Beberapa aspek yang terkait dalam peningkatan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan antara lain :

1. Keterlibatan stakeholder
2. Inovasi teknologi
3. Pendanaan yang berkelanjutan
4. Penekanan pada kebutuhan lokal
5. Pengelolaan risiko dan ketahanan
6. Pengembangan SDM
7. Evaluasi dan pembelajaran

Dengan memperhatikan aspek diatas dan melaksanakan

strategis yang sesuai, peningkatan kapasitas Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat menjadi kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat

Penguatan kapasitas Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, RKPD Kabupaten Demak tahun 2025 fokus pada peningkatan efektifitas capaian rencana pembangunan yang diarahkan terutama untuk : penuntasan program unggulan daerah tahun 2021-2026, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Bidang yang ada. Masing-masing Bidang wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Rencana Kerja juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum perangkat daerah dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Demak di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja PD berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka pendanaan dan program kegiatan PD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;

29. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan Renja adalah

1. Menjabarkan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 dalam rencana program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Rencana Kerja PD
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Menguraikan tentang kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2023.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang Tujuan dan Sasaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yang merupakan tahun Ketiga Renstra 2021-2026

BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kinerja 3 tujuan Renstra Bakesbangpol yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP dan Angka Kejadian Konflik Sosial, serta mencapai kinerja 5 sasaran yaitu persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target, Kasus konflik antar/intra umat beragama, Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik dan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa.

Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tahun 2023 adalah menitikberatkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19 dan yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun 2022

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bakesbangpol tahun 2023 tercapai sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja. Untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran Bakesbangpol didukung dengan 6 Program, 12 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp.

29.501.694.853,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sebagian besar merupakan dan usulan masyarakat, usulan pikir anggota dewan berupa hibah dan kegiatan Rp. 21.077.884.100,-

Anggaran Tahun 2023 terbesar untuk hibah KPU dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 16 mengatur tentang realisasi hibah untuk pemilukada serentak tahun 2024, haru sudah direalisasikan sebesar 40% 14 hari setelah penandatanganan NPHD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa Pemilihan Umum Serentak akan dilaksanakan Tahun 2024, sehingga tahun 2023 sebagai tahun politik dimanfaatkan beberapa anggota DPRD dan semua pihak mulai mempersiapkan secara serius untuk kontestasi pada Pemilu Serentak 2024 tersebut.

Pokok-pokok pikiran anggota DPRD di Tahun 2023 banyak yang masuk ke Badan Kesbangpol baik berupa kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah dan Pencegahan Faham Radikalisme serta untuk Pendidikan Politik masyarakat juga banyak yang diajukan untuk Hibah kepada Organisasi Kamasyarakatan.

Dakam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan, dilakukan penghitungan ulang beberapa kegiatan dan dilakukan pergeseran untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah terutama penambahan barang inventaris untuk menjuang pelayanan. Sementara itu anggaran hibah dari pikir dewan yang rencana diperuntukkan ormas ISNU karena NU telah mendapat Hibah di Tahun 2022 sehingga dialihkan Kompakdesi, selain pergeseran dalam rangka optimaliasi realisasi anggaran, maka anggaran kegiatan yang telah selesai digeser untuk mencukupi

kebutuhan lainnya terutama menambah aset/inventaris Bakesbangpol.

Adanya kesepakatan bersama pendanaan pelaksanaan pemilukada serentak taun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, ikut mengubah struktur dan besaran anggaran hibah yang telah disepakati antara KPU, Bawaslu Kabupaten Demak dengan Pemerintah Kab. Demak, sehingga terdapat penambahan anggaran untuk hibah pemilukada serentak 2024 sekitar 4 Milyar. Sehingga di Tahun 2023 APBD Perubahan Anggaran Badan Kesbangpol menjadi Rp. 33.852.160.700,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 33.268.019.680,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 98,27%

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mempunyai 2 indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti terealisasi 100% dari target dan persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan juga terealisasi 100%, sehingga tingkat ketercapaian sebesar 100%.

Program ini didukung 7 kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan indikator kinerja yang hampir seluruhnya terealisasi 100% hanya di sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah ASN yang terbayarkan gaji terealisasi 92% dikarenakan jumlah PNS sampai dengan Desember 2023 sebanyak 11 orang sedangkan di sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar 144%. Anggaran program ini sebesar Rp.

2.727.539.900,- tersebut digunakan dan teralisasi sebesar Rp. 2.579.721.297 secara umum tidak ada kendala yang berarti, meskipun hanya sebesar 94,58% dikarenakan besarnya pagu gaji ASN khususnya Gaji PNS yang tidak bisa terealisasi dikarenakan belum definitifnya pejabat Badan Kesbangpol. Selain itu juga karena efisiensi belanja pengadaan inventaris, aturan penggunaan alat elektronik terutama laptop harus menggunakan laptop hasil konsolidasi.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal.

Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti mencerminkan responsibilitas dan keterbukaan perangkat daerah dalam menghadapi temuan dan rekomendasi dari proses monitoring dan evaluasi. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggapi rekomendasi menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tidak hanya menilai dirinya sendiri secara kritis, tetapi juga bersedia melakukan perubahan untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya pelayanan yang lebih baik dan efisien. Sedangkan persentase pelayanan sesuai standar pelayanan mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Meskipun target telah tercapai namun Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik perlu melakukan perbaikan setiap hari,

agar siap menghadapi perubahan yang terjadi dan dapat melampaui harapan dari pengguna layanan sehingga menimbulkan kepuasan pengguna layanan. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam memberikan layanan.

Tahun 2024 alokasi anggaran program ini Rp. 3.704.461.413 dan telah terealisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar Rp. 1.391.632.072 atau 37,57% permasalahan yang ada adalah karena belum terealisasinya rapelan tunjangan fungsional analis kebijakan ahli muda.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ini mendukung visi Pemerintah Kabupaten Demak yaitu Bermartabat, melalui penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan diharapkan masyarakat Kabupaten Demak karakter yang berlandaskan pada Pancasila. Program ini mempunyai indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan dengan target 77% dan terealisasi 77% dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.024.218.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.798.053.910,- atau 88,83 %. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran, atau silpa dari pengadaan baik berupa makan minum maupun pembelian bahan. Keberhasilan Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat

daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan adanya komitmen dari stakeholder, selain itu juga materi yang disampaikan pada saat kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dapat dipahami oleh peserta yang hadir.

Kendala yang ada adalah jadwal kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat sepenuhnya terlaksana sesuai perencanaan dikarenakan adanya kegiatan yang merupakan aspirasi/pokir anggota dewan, sehingga menyesuaikan jadwal anggota dewan.

Pagu anggaran program ini pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.560.390.000, sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 592.537.500 atau 37,97%. Pada program ini terdapat kegiatan pembentukan paskibraka yang dilaksanakan bulan Agustus dan pokir kegiatan yang harus menyesuaikan jadwal anggota dewan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Program ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah yaitu peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini menetapkan Indikator yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 76% dan terealisasi sebesar 76,5% dengan ketercapaian 100,66 %.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 26.181.993.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.042.020.573,- atau 99,47%, seperti hal dengan program diatas, anggaran program bidang politik ini paling banyak dipergunakan untuk Hibah KPU dan

Bawaslu yang harus direalisasikan 40% dari nilai NPHD dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Demak yaitu sebanyak 8 Partai. Hibah ke Parpol baru bisa direalisasikan setelah hasil evaluasi dari BPK atas penggunaan hibah tahun sebelumnya diterbitkan.

Keberhasilan Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan adanya komitmen dari stakeholder.

Pagu anggaran program ini pada Tahun 2024 sebesar Rp. 38.166.908.900, sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 8.129.455.900 atau 21,30%. Masih kecilnya realisasi karena hibah untuk KPU sampai tutup buku triwulan II belum pengesahan SP2D.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pada program ini menetapkan indikator Persentase ormas yang terdaftar dan aktif sebesar 70%, indikator ini dapat tercapai melalui beberapa aktifitas meliputi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dari terget tersebut terealisasi 70% dengan ketercapaian 100%.

Keberhasilan pencapaian target program ini karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat yang tergabung dalam kelompok atau organisasi melaporkan keberadaannya, Bakesbangpol dalam setiap kesempatan juga mensosialisasikan pentingnya pendaftaran dan atau pelaporan keberdaaan ormas selain itu dengan telah adanya aplikasi silayarmas diharapkan memudahkan ormas melaporkan diri dan kegiatannya.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 855.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 831.634.500,- atau 97,22% secara umum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan lebih banyak untuk hibah ormas, kendala yang ada adalah adanya perbedaan pemahaman dalam pemberian hibah yaitu ormas yang menjadi Badan Otonom dari Ormas NU yaitu ISNU semula dianggarkan, karena tahun 2022 NU telah mendapat Hibah sehingga tidak jadi mendapat hibah dan dialihkan ke kegiatan dan sebagian untuk Hibah Kompakdesi.

Pagu anggaran program ini pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.257.880.000, sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 2.092.826.700 atau 92,69%. Pada program ini terdapat kegiatan Hibah Untuk LDII belum bisa terealisasi karena tahun 2023 sudah mendapat hibah, sehingga tahun 2024 berupa kegiatan dan dilaksanakan setelah perubahan dan pokok kegiatan yang harus menyesuaikan jadwal anggota dewan.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini untuk mendukung sasaran Bakesbangpol yaitu Kasus Konflik antar umat beragama, Bakesbangpol menetapkan sasaran tersebut karena sentimen agama mempunyai efek yang sangat besar, konflik yang dipicu oleh agama akan sulit diredam, oleh karena itu selama kurun waktu lima tahun periode diharapkan tercipta kerukunan umat beragama.

Pada program ini menetapkan indikator kinerja yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% dengan tingkat ketercapaian 100%. Capaian ini menjadi gambaran bahwa kerukunan umat bergama sangat penting.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 649.627.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 638.606.000,- atau 98,3% secara umum dapat terlaksana dengan baik, permasalahan yang timbul adalah masih kurangnya jangkauan melakukan tes narkoba.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini menetapkan indikator Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial, sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 potensi konflik yang terjadi dan telah dilakukan penyelesaian potensi konflik tersebut sehingga tercapai 100% Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.413.382.100 dan terealisasi sebesar Rp. 1.377.983.400,- atau 97,5% secara umum dapat terlaksana dengan baik, permasalahan selain karena refocussing adalah aturan pemberian honor berdasarkan Perpres 33 Tahun 2020 khususnya untuk honor forkopimda, solusi yang dilakukan yaitu dengan refocussing/pergeseran anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2023
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESBANGPOL Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
8	1	1	02.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10	10	10	10	100%	10	10	100
8	1	1	02.01	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	4	4	4	100%	4	12	50
8	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	50
8	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	1	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	50
8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji & tunjangan nya	20 Orang	12 Orang	12 Orang	13 Orang	91,70%	20 Orang	19 Orang	95,00%
8	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00%
8	1					Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100%	100 Persen	100 %
8	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Orang	-	20 Orang	20 Orang	100,00%	0	0	100%
8	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00%	0	20 Orang	100%
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100,00 %	100 Persen	100%
8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	2 Paket	100 %
8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	4 Paket	200, %
8	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200, %
8	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3 Laporan	4 Laporan	80,00%
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	26 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	143,90%	72 Laporan	168 Laporan	49,12%
8	1	1	02.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	14 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	0	6 Unit	42,90%
8	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	0	3 Unit	100,00 %
8	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	0	4 Unit	80,00%
8	1	1	02.07	# #	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	0	4 Unit	100,00 %
8	1	1	02.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100 Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100%	100 Persen	100,00 %
8	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
8	1	1	02.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	4 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00%	4 Unit	4 Unit	100%
8	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	15 Unit	100,00%	15 Unit	15 Unit	100%
8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100%
8	1	1	02.09	# #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	10 Unit	10 Unit	100%
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	86,00%	%	75,00%	76,40 %	101,90 %	81	81,00 %	94,19 %
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	3 Dokumen	2Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	2	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
8	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11050 Orang	Orang	2380 Orang	2380 Orang	100,00%	1270 Orang	7565 Orang	68,46 %
8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	250 Orang	350 Orang	350 Orang	100,00%	350 Orang	950 Orang	63,33%
8	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	82,00%	75,20%	76,00%	76,50 %	100,66 %	77	77,00 %	93,90 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8	1	3	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
8	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10820 Orang	600 Orang	3600 Orang	3600 Orang	100%	600 Orang	4800	44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	3	03.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 Orang	0	150 Orang	150 Orang	100%	150	300 Orang	50%
8	1	3	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persesntase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	74,00%	66,00%	70,00%	70,00 %	100,00 %	71%	71,00 %	95,95 %
8	1	4	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	4	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
8	1	4	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2050 Orang	60 Orang	780 Orang	780 Orang	100%	370 Orang	1210 Orang	59,02%
8	1	4	03.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	340 Orang	0	65 Orang	65 Orang	100%	35 Orang	100 Orang	29,41%
8	1	4	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	90,00%	78,00%	80,00%	80,00 %	100,00 %	83%	83,00 %	92,22 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,30%	2 Dokumen	1 Dokumen	33,30%
8	1	5	02.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0	1 Dokumen	25,00%
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2300 Orang	190 Orang	600 Orang	600 Orang	100,00%	600 orang	1.390 Orang	60,43%
8	1	5	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022- 2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00%	0,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %
8	1	6	02.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	<i>60 Laporan</i>	<i>Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>36 Laporan</i>	<i>60,00%</i>
8	1	6	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	200 Orang	800 Orang	800 Orang	100,00%	200 Orang	1200 Orang	150,00 %
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	100,00%	56 Orang	56 Orang	100,00 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
8	1	6	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
8	1	6	02.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%

Tabel 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = (8/6) \times 100$	$11 = (9/7) \times 100$	12

N I H I L

Badan Ketuan Bangsa dan Politik bukan perangkat daerah pengampu program prioritas namun hanya sebagai superting system tercapainya kinerja program prioritas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Pemerintahan Umum, salah satu tugas utamanya yaitu membantu menciptakan kondusifitas wilayah.

Dengan terwujudnya wilayah Kabupaten Demak yang kondusif diharapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat dengan ditandai meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Demak. Meskipun bukan satu-satunya indikator yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi di daerah, namun dengan kondusifitas yang stabil maka investor memiliki modal awal untuk berinvestasi.

Selama kurun waktu 2 tahun pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, Badan Kesbangpol dengan adanya perubahan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tidak lagi mengampu IKK maupun SPM.

Namun demikian Badan Kesbangpol tetap melaksanakan tugas bidang pemerintahan umum dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketiadaan indikator Output dan outcome IKK dan SPM maka Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan juga mampu menjawab sebagian indikator yang ada dalam SDGs, indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dan indikator lain yang sebagai data dukung penilaian Pemerintah Kabupaten Demak

Indikator kinerja yang dijadikan acuan Badan Kesbangpol dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan melalui survei kepada masyarakat baik yang telah kegiatan sosialisasi, workshop maupun yang belum.

Selain itu juga mengacu indek ormas yaitu persentase ormas aktif yang merupakan IKK, dalam indikator tersebut tertulis dengan kata LSM namun pengertian LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak ada bedanya sehingga masuk ke Bakesbangpol.

Pencapaian pelayanan kinerja perangkat Daerah digambarkan dalam table 2.3 berikut

Tabel 2 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Demak

No	Indikator	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	88,2	89,5	90,8	92	88,3	89,5	91	92	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	V	-	-	77,3	79,18	80,07	80,07	77,91	78,21	80,07	81,74	Tidak tercapai
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	V	-	-	100	100	100	100	100	75%	100	100	Tidak tercapai
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0= tidak ada kejadian
6	Kasus konflik antar umat beragama	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0= tidak ada Kasus
7	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	V	-	-	74,5	76,08	78,1	79,68	75,3	77,06	78,1	79,68	
8	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	V	-	-	79,3	81,2	82,8	84,20	80	82	82,8	84,20	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 dan 2024 program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap difokuskan pada terciptanya kondusifitas wilayah, Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yaitu pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif yang telah dilaksanakan bulan Februari 2024 dan pemilihan serentak Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota di Bulan Nopember 2024 berpotensi menimbulkan potensi konflik termasuk di wilayah Kabupaten Demak, penguatan karakter kebangsaan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara, dan pendidikan politik masyarakat serta peningkatan kapasitas Ormas sehingga berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI dan menjaga terwujudnya kondusifitas wilayah. Tahun 2023 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026, diwarnai dengan berjalannya program kegiatan sebagai upaya percepatan pencapaian program unggulan Bupati yang mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati periode tahun 2021 – 2026.

Upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik perlu ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan antar aparat agar pelaksanaan pemilu serentak bisa terselenggara dengan baik dan sukses tanpa ekses guna mewujudkan kondusifitas wilayah.

Badan Kesbangpol berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum yang terdiri dari

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kebijakan Pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat mengharuskan penghapusan proses birokrasi yang terlalu lama dan berjenjang, sehingga setiap perangkat daerah hanya ada 2 (dua) tingkat struktural. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Bupati

Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pendewasaan politik yang salah satunya ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan serentak, yaitu pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Demak patut mendapatkan catatan tersendiri. Tingkat partisipasi masyarakat Demak dalam Pilkada serentak tersebut mencapai 82,46%. Angka ini melebihi dari target capaian pada Badan Kesbangpol sebesar 70% dan juga target KPU sebesar 77%. Pada perhelatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi diwarnai dengan adanya tuntutan penundaan pelaksanaan partisipasi pemilih masih mencapai 73,4% sedikit diatas target Badan Kesbangpol meskipun masih dibawah target KPU. Namun untuk tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada Gubernur masih sangat rendah yaitu 57,48% .

Berkaca dari hasil pemilu serentak pemilihan legislatif dan presiden yang tinggi, diharapkan pemilu serentak kepala daerah juga meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya terutama pemilihan Gubernur.

Hasil Pemilu serentak Presiden dan Legislatif yang diselenggarakan bulan Februari 2024 berjalan dengan kondusif dan telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dan Anggota legislatif baik DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan tingkat partisipasi rata-rata 85,78%, dengan perincian sebagai berikut :

Pemilihan Presiden	: 86,1%
Pemilihan DPR RI	: 85,9%
Pemilihan DPD RI	: 86,0%
Pemilihan DPR Provinsi	: 85,9%
Pemilihan DPR Kabupaten	: 85,0%

Pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat bidang politik, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi masyarakat

dalam politik dan pembangunan di daerah. Ormas sebagai salah satu pilar politik juga perlu dilakukan pemberdayaan.

“SETARA Institute for Democracy and Peace” telah melakukan survei di 5 kota besar di Indonesia yaitu di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Metode pengumpulan data dilakukan oleh surveyor secara face to face interview dengan Metode Purposive sampling digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dituju. Selanjutnya surveyor mengambil sampling dengan metode simple random sampling untuk menetapkan siswa SMA sebagai responden. Jumlah sampel yang sebanyak sebanyak 947 dengan margin of error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian diselenggarakan pada Januari-Maret 2023

Salah satu Hasil temuan survei tersebut Temuan terkait **syariat Islam sebagai landasan bernegara**, didukung oleh 56,3% responden. Oleh karenanya, dukungan terhadap persepsi bahwa **Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen**, artinya bisa diganti, juga sangat besar yakni 83,3% responden.

Meskipun survei dilakukan hanya di 5 kota, tidak tertutup kemungkinan di wilayah Kabupaten Demak para generasi muda khususnya anak setingkat SLTA akan mempunyai persepsi bahwa Pancasila bukan Ideologi Permanen atau bisa diganti.

Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme khususnya dikalangan generasi muda milenial dan adanya indikasi kegiatan eksklusif yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah menyebabkan menurunnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa.

Sebagaimana tertera dalam Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis. Berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Demak pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten

Demak berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol, yaitu

- a. Kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol
- b. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesbangpol
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang politik
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa
- e. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan Antar Umat Beragama

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan isu strategis tersebut, rencana kerja Badan Kesbangpol tahun 2025 diarahkan pada upaya

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan bangsa meliputi peningkatan kerukunan umat beragama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan berupa penguatan Ideologi Pancasila, Bela Negara, pembauran kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan terjalinnya koordinasi serta komitmen antara aparat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah melalui Penanganan Konflik Sosial dan fasilitasi Forkopimda.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat melalui pendidikan politik bagi generasi muda berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat khusus yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan untuk turut serta aktif dalam proses demokratisasi di Kabupaten Demak.
6. Meningkatkan tertib administrasi dan kinerja pelayanan publik sesuai tupoksi.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam pelaksanaan 6 program dan 12 kegiatan serta 43 Sub Kegiatan. Adapun dari 6 program tersebut terdiri dari 1 program rutin yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 5 program prioritas. Lima program prioritas tersebut meliputi

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Kegiatan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Setelah rencana kerja awal disusun dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah dan musrenbang dan juga pembahasan internal, kegiatan/sub kegiatan yang dirasa kurang memenuhi prioritas kemudian dipending dan guna mengakomodir usulan ditambahkan pada sub kegiatan yang lain.

Percepatan pencapaian program unggulan Pemerintah Kabupaten Demak dan gelaran pelaksanaan Pemilu serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah turut mempengaruhi alokasi anggaran perangkat daerah termasuk Badan Kesbangpol yang kebetulan tidak mengampu program unggulan. Perangkat Daerah yang mengampu program unggulan diberikan kesempatan untuk memacu pencapaian target kinerja termasuk anggaran.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamanatkan bahwa Program Paskibra dilaksanankan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum

sehingga dalam hal ini perangkat daerah itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program Paskibraka yang semula ada di Dinas Pemuda dan Olahraga mulai Tahun 2024 beralih ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meskipun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 mengamanatkan peraturan berlaku setelah diundangkan, karena untuk kesiapan perangkat daerah bakesbangpol melaksanakan program tersebut. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditindaklanjuti penambahan sub kegiatan baru yang berkaitan Pembentukan Paskibraka dan Purna Paskibraka masuk dalam urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Rencana penerimaan ASN Tahun 2024 berimplikasi pada besaran anggaran yang akan dipergunakan untuk mencapai target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta program prioritas karena tidak adanya tambahan Transfer Dana Alokasi Umum untuk membiayai gaji ASN baru Tahun 2024.

Pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2024

Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada Program Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdapat tambahan 5 sub kegiatan, namun dari lima sub kegiatan tidak semua diambil menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Total anggaran rencana awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 sebesar Rp. 10.300.111.900,00,- terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, setelah dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah, musrenbang

serta pembahasan lanjutan desk pokok pikiran anggota DPRD total anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi sejumlah Rp. 12.188.582.600,- penambahan ini dikarenakan tambahan dari Pokir Anggota Dewan, tambahan anggaran hibah dan bantuan Partai Politik, sedangkan pagu untuk perangkat daerah berkurang. Anggaran tersebut untuk mendukung 6 Program, 12 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

Lebih lanjut evaluasi rancangan awal RKPD dan hasil evaluasi ditampilkan dalam table 2.4 berikut

Tabel 2 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Bakesbangpol

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.300.111.900	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.188.582.600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti - Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100% 100%	3.930.769.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti - Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100% 100%	3.930.769.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	34.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	8.721.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.976.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.745.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	3.376.719.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	3.098.433.100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	3.195.519.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.935.211.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	181.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.935.211.000	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	118.750.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	118.750.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	18.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	18.750.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100.000.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	167.900.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	167.900.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.643.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.076.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Dokumen	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Dokumen	125.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	<i>5 Unit</i>	40.000.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	<i>5 Unit</i>	40.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.100.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.200.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	<i>100%</i>	14.000.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	<i>100%</i>	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedia-an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	<i>6 Paket</i>	179.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	<i>6 Paket</i>	180.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.450.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	11.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	47.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	40.950.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	83	1.305.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	83	1.265.000.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>	3	1.305.000.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>	3	1.265.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	215.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	525.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	80.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	50.000.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	-	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	-	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	0	550.000.000	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	30 Orang	550.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	100.000.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10.000.000	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	50.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	00	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	50.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	30 Orang	50.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	2.001.342.500	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	3.071.472.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun</i>	<i>2</i>	<i>2.001.342.500</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun</i>	<i>2</i>	<i>3.071.472.000</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	335.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	1.641.342.500	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	2.686.472.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Perseentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	72	830.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Perseentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	72	2.490.000.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>	<i>2</i>	<i>830.000.000</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>	<i>2</i>	<i>2.490.000.000</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	650 Orang	270.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550 Orang	440.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	45.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	25.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.025.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	87	715.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	87	265.000.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		<i>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</i>	2	715.000.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		<i>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</i>	2	265.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	650 Orang	150.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	49.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	16.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	200.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100	1.518.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100	1.432.586.500	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	12	1.518.000.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	12	1.432.586.500	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	180.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	40.450.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	288.633.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	120.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	170.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	853.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	933.503.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkan indikator sasaran yang menjadi kinerja utama Badan Kesbangpol diberikan hibah untuk operasional organisasi kemasyarakatan bentukan Pemerintah yaitu MUI Kabupaten Demak dan FKUB Kab. Demak, selain kedua forum tersebut juga diberikan hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sekaligus sebagai mitra dan stakeholder Badan Kesbangpol serta 1 organisasi masyarakat yaitu LDII.

Selain itu juga dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD terdapat aspirasi berupa hibah operasional untuk organisasi kemasyarakatan yaitu untuk NU dan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan ormas, aspirasi dari anggota dewan diakomodir karena mendukung tercapainya indikator sasaran Badan Kesbangpol.

Usulan program dan Kegiatan masyarakat dari usulan masyarakat yang diakomodir Badan Kesbangpol dan pokok pikiran anggota DPRD tercantum dalam table 2.5 sebagai berikut

Tabel 2 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Kab Demak		Jumlah peserta Wasbang masyarakat Kabupaten Demak	100.000.000	45 Orang	Pokir
	Kegiatan Ziarah Kebangsaan Di Kab Demak		Jumlah peserta Ziarah Kebangsaan masyarakat Kabupaten Demak	155.000.000	80 Orang	Pokir
	Ziarah Kebangsaan Bagi Generasi Muda Di Kabupaten Demak		Jumlah peserta Ziarah Kebangsaan Generasi muda Kabupaten Demak	100.000.000	45 Orang	Pokir
	Capacity Building dalam rangka Wawasan Kebangsaan untuk tokoh masyarakat Kecamatan Karanganyar		Jumlah peserta capcity building dalam rangka wasbang tokoh masyarakat kecamatan Karanganyar	100.000.000	45 Orang	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Fasilitasi operasional FPK	50.000.000	1 Tahun	
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokarsi Indonesia (IDI)			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik Sistem dan Implementasi Politik</i>			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Dapil 2 (Kec. Bonang - Kec. Wedung)		Jumlah peserta Wasbang dan Pendidikan Politik masyarakat dapil 2	75.000.000	45 Orang	Pokir
	Pendidikan Politik dan Wawasan kebangsaan Dengan Napak Tilas Kebangsaan Tokoh Perempuan Desa Wonosalam		Jumlah peserta Pendidikan Politik dan Wasbang Tokoh Perempuan Desa Wonosalam	100.000.000	45 Orang	Pokir
	Penguatan Ideologi Pancasila Bela Negara dan latihan Kepemimpinan Untuk Generasi Muda Desa Wonosalam Kec Wonosalam		Jumlah peserta Penguatan Ideologi Pancasila dan Latih Kepemimpinan Generasi Muda Desa Wonosalam	100.000.000	40 Orang	Pokir
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Hibah Bantuan kepada Partai Politik	Kabupaten Demak	Jumlah Partai politik yang mendapatkan hibah bantuan keuangan	2.686.472.000	8 Partai	Pokir
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persesntase Organisai masyarakat yang terdaftar dan aktif			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pemberdayaan dan pengembangan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan di Kab. Demak		Jumlah peserta Pemberdayaan dan pengembangan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan di Kab. Demak	200.000.000	100 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.025.000.000	12 Laporan	
	Hibah Kepada MUI	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional MUI	200.000.000	1 Tahun	
	Hibah Kepada PCNU		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional PCNU	700.000.000	1 Tahun	
	Hibah Kepada PD Muhamadiyah		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional PD Muhamadiyah	700.000.000	1 Tahun	
	Hibah Kepada PD LDII		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional PD LDII	100.000.000	1 Tahun	
	Hibah Kepada Yayasan Rumah Hukum BRATA		Operasional Rumah Hukum BRATA	325.000.000	1 Tahun	Pokir
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</i>		<i>Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Beragama dan penghayat kepercayaan</i>			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000	12 Laporan	
5	Hibah Kepada FKUB PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kabupaten Demak	Fasilitas Kegiatan dan Operasional Ormas FKUB Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	200.000.000	1 Tahun	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000	12 Laporan	
	Hibah kepada FKDM			50.000.000	1 Tahun	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025-2029. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN. Pada bulan Februari 2024 baru dilaksanakan pemilihan presiden. Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 19 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, RPJMN ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik.

Pada saat RKPD ini disusun, RPJMN 2025-2029 belum ditetapkan sehingga belum diketahui Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 akan mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, sampai dengan Rancangan RKP 2025 dipublikasikan. Sementara itu, pada kick off meeting penyusunan RKP 2025, disampaikan tema pembangunan tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

RPJMN 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN 2025-2045 yang membawa visi Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Arah kebijakan periode pertama RPJPN 2025-2045 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi.

Fondasi transformasi tersebut meliputi:

- 1) Transformasi Sosial. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
- 2) Transformasi Ekonomi. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Transformasi Tata Kelola. Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,

digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, tema pembangunan provinsi Jawa Tengah yaitu Penumpu Ketahanan Pangan Dan Rantai Nilai Industri Nasional. Terdapat beberapa highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi yang secara khusus menyentuh Kabupaten Demak yaitu:

1. Pengembangan kawasan strategis industri Pantura Jateng (industri kimia, industri logam dan bahan galian, industri mesin, industri migas, industri aneka);
2. Pengembangan kawasan strategis agrikultur Dieng-Serayu, Jratunseluna dan Bengawan Solo-Brantas;
3. Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Tengah;
4. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kedunglanggar, Dolog, Bodri, Cabelan, dan Karangnongko serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air;
5. Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan nature based solution untuk mereduksi banjir di Kota Semarang, Demak-Grobogan-Kudus-Pati.

Pada RPJMN 2019-2024, Kabupaten Demak menjadi penerima manfaat Major Project ke-27: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa. Manfaat MP ini adalah:

- 1) mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon;

- 2) meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II;
- 3) menurunkan waktu tempuh Semarang-Demak dari 1 jam menjadi 25 menit; dan
- 4) meningkatkan konektivitas Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas.

Dalam RPJMN 2025-2029 terdapat fondasi transformasi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, Salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu “Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi”, sejalan dengan Misi 1 Bupati dan wakil Bupati Demak disebutkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya dan Misi 3 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kondusifitas wilayah menjadi kunci dalam tata kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan inventasi daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Demak memang terlihat kondusif namun melalui media online penyebaran Ideologi transinternasional oleh kelompok-kelompok masyarakat masih ada dan terus menyebarkan faham-faham yang akan mengganti ideologi Pancasila, kelompok ini sering menyasar pada generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa yang pemahaman tentang ideologi Pancasila masih minim.

Dari beberapa orang yang tertangkap karena terlibat dalam kelompok menyebarkan faham-faham yang akan mengganti Ideologi Pancasila mempunyai hubungan dengan warga Demak, atau bahkan sebelumnya pernah menjadi warga Demak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol bidang Ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan maka rencana kerja

Tahun 2025 juga diarahkan untuk pemantapan Ideologi Pancasila dan peningkatan karakter kebangsaan yang akhir-akhir ini ada indikasi gerakan-gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, melalui peningkatan pemantapan ideologi, karakter kebangsaan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, peningkatan pendidikan politik serta peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2021-2026 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**,.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah

1. Memperkuat Tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas, dan berdaya saing;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan isu-isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupai dan Wakil Bupati maka tujuan dan sasaran prioritas yaitu

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	81,74
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Bakesbangpol yang mencapai target	Persen	100
2	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
3.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	Kejadian	0
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	84,2
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	Persen	79,68

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 tertuang dalam 6 program dan 11 Kegiatan serta 47 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.188.582.600, bila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp. 46.585.606.500 ada penurunan yang cukup signifikan dikarenakan anggaran Tahun 2024 lebih besar dikarenakan ada Hibah untuk KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim dalam rangka pelaksanaan Pemilukada serentak 2024.

Organisasi kemasyarakatan yang turut berjasa memperjuangkan Kemerdekaan RI yaitu NU dan Muhammadiyah tahun 2025 tetap dianggarkan hibah sambil menunggu fatwa dari BPK terkait pemberian hibah berturut-turut bagi NU dan Muhamadiyah.

Pokok-pokok pikiran Anggota Dewan ada yang dititipkan di Bakesbangpol sejumlah 9 kegiatan senilai Rp. 1.225.000.000 baik berupa kegiatan maupun berupa hibah.

Berdasarkan permohonan kenaikan bantuan Partai Politik yang diajukan beberapa parpol di Kabupaten Demak, maka dalam rencana diusulkan kenaikan menjadi sebesar Rp. 4.000 persuara dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp. 2.500/persuara.

Rencana pendanaan program Badan Kesbangpol adalah terdiri dari

1. Program Penunjang Operasional Pemerintah Daerah, Total anggaran sebesar Rp. 3.664.524.100,00 terbesar dipergunakan untuk gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 2.935.211.000,00,-.

Pada Program ini untuk mendukung pencapaian 2 indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100%.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Total anggaran sebesar Rp. 1.265.000.000,00,- anggaran terbesar untuk kegiatan Paskibraka sebesar Rp. 610.000.000,- merupakan akomodir pikir dewan yaitu sebesar Rp. 455.000.000,-
Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdapat 4 Sub Kegiatan yang tidak ada dalam Renstra Badan Kesbangpol, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, bahwa pembinaan Paskibraka dan purna paskibraka duta Pancasila dilaksanakan oleh perangkat daerah urusan pemerintah umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pembentukan Paskibraka yang ditahun 2022 dan 2023 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan dengan target 83% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan target 81%.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Total anggaran sebesar Rp. 3.071.472.000,00,- pagu tersebut terbesar Hibah Bantuan Parpol sebesar Rp. 2.686.472.000,00 untuk 8 Parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Demak namun angka ini bisa berubah menunggu hasil penghitungan suara hasil pemilu 2024.
Anggaran Program untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target 79%.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Total anggaran sebesar Rp. 2.490.000.000,00

pagu terbesar untuk PCNU dan PD Muhamadiyah LDII Rp. 1.200.000.000,- dan Pokir Hibah untuk Yayasan Rumah Hukum BRATA Rp. 325.000.000,-

Anggaran program dan kegiatan ini untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Ormas yang terdaftar dan aktif dengan target 72%, dengan telah terbangunnya sistem aplikasi ormas diharapkan data base ormas lebih tertata dan ormas yang aktif lebih banyak.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 265.000.000,00, anggaran terbesar dipergunakan untuk Hibah FKUB sebesar Rp. 200.000.000,-

Anggaran program ini untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama dengan target 87%. Selain itu juga untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu Kasus Konflik Antar Umat Beragama dengan target 0 kasus, 0 berarti tidak ada kasus konflik antar umat beragama di Kabupaten Demak.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.432.586.500,- pagu terbesar dipergunakan untuk fasilitasi Forkopimda.

Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial dengan target 100%. Pada program ini semua potensi konflik yang ada diupayakan dapat tertangani dan terselesaikan pada tingkat bawah, bila tidak bisa selesai baru dinaikkan ke tingkat atasnya.

Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terfasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik komunal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bukan perangkat daerah yang mengampu program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Demak sehingga tidak ada program dan kegiatan spesifik untuk turut serta penurunan kemiskinan dan stunting, namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program yang diampu memberi suport untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting yaitu sosialisasi/talk show penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan pada program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Selain program tersebut melalui Hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdapat dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dalam setiap kegiatan pertemuan/sosialisasi juga terdapat disampaikan materi tentang pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang menjadi perhatian dan titik berat pencapaian target pemerintah Kabupaten Demak

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Badan Kesbangpol secara lengkap sebagaimana tertera dalam table 4.1 sebagai berikut

Tabel 4 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2026 KABUPATEN DEMAK

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12.188.582.600							10.426.085.184	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						12.188.582.600							10.341.585.184	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						12.188.582.600							10.341.585.184	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	-			100 % 100 %	3.664.524.100						-	2.410.242.684	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	-			10 Dokumen	8.721.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Pening katan tata kelola Pemerin tahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakes bangp ol	-	23.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	5.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Pening katan tata kelola Pemerin tahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		19.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.976.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Pening katan tata kelola Pemerin tahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.745.500	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan</i>	-			1 Dokumen	3.098.433.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol	-	2.160.742.684	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bul an	2.935.211.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		1.911.114.184	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	163.222.100	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		249.628.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	118.750.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol	-	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				20 Paket	18.750.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	100.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	206.419.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol	-	52.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		14.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	20.643.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		6.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	17.076.500	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.200.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				3 Laporan	2.500.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		3.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				70 Laporan	125.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		83.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	-			3 Paket	39.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol	-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	18.100.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		0,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	21.200.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		0,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	-			100 persen	12.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol	-	12.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Demak,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		12.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	-			40 Unit	180.900.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesbangpol	-	102.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46.450.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesbangpol		25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	75.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesbangpol		55.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	11.500.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesbangpol		8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	40.950.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN Bakesb angpol		7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	-			83 %	1.265.000.000						-	1.245.000.000	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	-			2 Dokumen	1.265.000.000			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama	-	1.245.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,				800 Orang	525.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>													
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				350 Orang	80.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				12 Laporan	50.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				30 Orang	550.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				30 Orang	50.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-			79 %	3.071.472.000						-	2.216.342.500	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	-			2 Database	3.071.472.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama	-	2.216.342.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				390 Orang	335.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama		300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				25 Orang	50.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama		240.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	2.686.472.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama		1.676.342.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	-			72 %	2.490.000.000,00					-	2.220.000.000,00		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	-			2 Dokumen	2.490.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyara kat	-	2.220.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				450 Orang	440.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat		250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	25.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat		70.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	2.025.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo		1.900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
													k masyara kat			
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama</i>	-			87 %	265.000.000						-	1.120.000.000	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</i>	-			2 Dokumen	265.000.000			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat	-	1.120.000.000	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				150 Orang	49.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaan	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo		250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
													k masyara kat			
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	16.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyarakat		20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	200.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompok masyarakat		850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	-			100 %	1.432.586.500					-	1.130.000.000		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	-			12 Laporan	1.432.586.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat	-	1.130.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				42 Orang	40.450.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat		105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60 Orang	288.633.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat		300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	170.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo k masyara kat		75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	933.503.500	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	tokoh masyara kat, tokoh pemuda, tokoh agama ormas, dan kelompo		650.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUN G JAWA B	
							TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
												k masyara kat					
	J U M L A H							12.188.582.600								10.426.085.184	

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dalam rincaian 9 (sembilan) program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 bukan sebagai perangkat daerah pengampu/penanggung jawab.

Namun demikian sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tujuan mewujudkan kondusifitas wilayah selalu support atau hanya sebagai suporting system tercapainya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati melalui berbagai kegiatan peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, buda dan agama serta kegiatan peningkatan koordinasi jajaran aparat intelijen di daerah.

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4 2 Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					N I H I L								

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Demak tahun 2025 merupakan rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak berpedoman pada:

1. Tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum di daerah.
2. Isu-isu strategis Badan Kesbangpol yang digali berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya
3. Visi dan misi Bupati Demak terpilih.
4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program & Kegiatan Periode Sebelumnya guna perumusan kegiatan, alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Badan Kesbangpol
5. Usulan Program Serta Kegiatan dari Masyarakat dalam perumusan kegiatan dalam rancangan Renja guna mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas
6. Usulan Kenaikan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025 mengalami kenaikan dari yang semula Rp. 2.500 persuara di tahun 2024 menjadi Rp. 4.000 persuara
7. Pilkada yang akan berlangsung tanggal 27 Nopember 2024 telah diantisipasi penyediaan anggaran melalui hibah kepada KPU Tahun 2024 untuk gugatan/sengketa hasil Pilkada, sedangkan di di Program Bakesbangpol hanya disediakan untuk monitoring pasca Pilkada.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam satu tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan dokumen Renja tahunan merupakan bagian dari pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol dan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan sasaran Renstra yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, diharapkan untuk

1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerja sama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;

4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2025 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.